

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang mayoritas beragama Islam, memiliki sistem pendidikan yang unik dan khas, yaitu pesantren. Dikatakan unik karena pesantren memiliki karakteristik yang berbeda dengan sekolah pada umumnya, seperti adanya istilah kiai/pengasuh, santri, pondok, dan kitab kuning. Sementara itu, disebut khas karena model pendidikannya hanya berkembang dengan pesat di Indonesia. Bahkan pesantren diyakini sebagai pendidikan Islam produk orisinal bangsa Indonesia (Mahdi, 2013).

Pesantren merupakan sebuah lembaga penyiaran agama (*dakwah Islamiyyah*) dan sekaligus sebagai lembaga pendidikan (Rahardjo, 1985). Sementara menurut Roihan dalam Nahrawi (2008) menyebutkan bahwa pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia karena diidentifikasi telah berjalan secara beriringan dengan sejarah masuknya ajaran Islam di negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilacak dari sejarah berdirinya pondok pesantren yang telah ada sejak abad ke 15. Salah satunya adalah pondok Pesantren Glagah Arum yang didirikan oleh Raden Fatah tahun 1476. Tercatat sampai dengan abad ke 19 telah berdiri pesantren yang dipimpin oleh para walisongo, seperti Pondok Pesantren Sunan Malik Ibrahim di daerah Gresik, Pondok Pesantren Sunan Bonang di Kabupaten Tuban, Pondok Pesantren Sunan Ampel di Surabaya dan Pondok Pesantren Tegal Sari yang sangat terkenal di pulau Jawa (Nahrawi, 2008).

Secara historis perjalanan pendidikan Islam di Indonesia telah memiliki banyak pengalaman tentang bagaimana cara bertahan ditengah arus modernisasi yang sangat deras tanpa harus meninggalkan identitas aslinya. Salah satu bentuk

kongkrit dari pengalaman tersebut adalah upaya untuk terus melakukan perubahan sistem pendidikan Islam sebagai jawaban dari kolonialisme dan ekspansi Kristen. Sistem pendidikan Islam yang pada mulanya berbasis pada pesantren dan surau, kemudian bertransformasi menjadi lembaga pendidikan Islam yang modern. Perubahan tersebut dapat di lihat dari, *pertama* upaya pesantren untuk meniru sekolah model Belanda, akan tetapi muatan pengajarannya dengan materi Islam dan *kedua* pendirian madrasah modern yang secara substansi dan metodologi pendidikan mengikuti pendidikan model Belanda (Azra, 2000).

Menurut Steenbrink (1994) perubahan pola pada lembaga pendidikan Islam di Indonesia saat itu merupakan salah satu bentuk reformasi terhadap sistem pendidikan Islam dalam menanggapi model pendidikan Belanda. Resistensi dari sistem pendidikan yang telah dibuat oleh Pemerintahan Belanda menjadikan pesantren harus berbenah. Bahkan Pemerintah Belanda menyebut bahwa pendidikan Islam di Indonesia sebagai sekolah liar.

Upaya Pemerintah Belanda untuk membatasi perkembangan lembaga pendidikan Islam sangat sporadis. Hal tersebut dapat di lihat dari kebijakan Pemerintah Belanda mengeluarkan aturan yang dikenal dengan *wilde schoolen ordonantie* pada tahun 1933. Akibat dari kebijakan tersebut, pendidikan Islam menjadi sulit berkembang dan tertutup untuk menerima ide-ide baru yang datang dari luar tradisi Islam dan pesantren. Disisi yang lain kebijakan Belanda terhadap pendidikan Islam menjadikannya bersemangat untuk semakin banyak mendirikan pendidikan Islam. Para pemuka agama meyakini bahwa dengan berdirinya lembaga pendidikan Islam dapat digunakan untuk pembelajaran agama Islam dan sekaligus sebagai ruang konsolidasi untuk melakukan perlawanan terhadap Pemerintahan Belanda (Tilaar, 2004).

Dinamika perjalanan pendidikan Islam mengalami pasang surut, hingga pada akhirnya mendapatkan pengakuan dari Pemerintah. Pengakuan tersebut tertuang pada surat keputusan bersama tiga menteri (SKB) antara Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri pada tahun 1975. Sehingga menjadikan pendidikan Islam memiliki kedudukan sama sebagai bagian dari sub sistem pendidikan nasional (Syukur, 2002). Menurut Fadjar (1998), keluarnya SKB tersebut sebagai langkah untuk meningkatkan mutu dan kualitas lembaga pendidikan Islam, baik dari segi lulusan, status, ataupun proses dan keberadaan pendidikan Islam.

Selanjutnya, perjalanan pendidikan di Indonesia masih mengalami dualisme, yaitu adanya dikotomi antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam. Pendidikan umum lebih banyak mengajarkan materi-materi umum. Hal tersebut dapat di lihat pada materi sekolah dasar dan sekolah menengah, sementara pendidikan agama lebih banyak mengajarkan materi agama, sama seperti di pesantren. Keberadaan pendidikan Islam dari dulu hingga saat ini mengalami kesenjangan dalam berbagai macam aspek dan menghadapi berbagai macam persoalan, mulai dari persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan pendidikan, sumber daya manusia, serta manajemen pendidikan Islam (Janah, 2013).

Janah (2013) melanjutkan, memang pasca Indonesia merebut kemerdekaan, umat Islam semakin memiliki kesadaran akan pentingnya sebuah pendidikan. Hal tersebut dapat di lihat dari ikhtiar Pemerintah dalam memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia. Salah satu buktinya adalah usaha Pemerintah dalam merumuskan UU Republik Indonesia No 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan kemudian dilanjutkan dengan UU NO 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang

penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sebagai salah satu upaya dalam pengintegrasian pendidikan agama Islam ke dalam sistem pendidikan nasional.

Sanaky (2004) menjelaskan usaha dan komitmen Pemerintah dalam memperbaiki pendidikan Islam di Indonesia dapat di lihat dari keberadaan UU Sisdiknas Tahun 2003. Meskipun perbaikan yang dilakukan belum menyentuh pada hal-hal yang bersifat fundamental dan terkesan hanya formalitas, setidaknya dapat dimaknai secara positif, yaitu adanya niatan baik Pemerintah untuk memperbaiki pendidikan Islam. Semestinya Pemerintah harus lebih memperhatikan kembali dengan melakukan pembenahan yang berorientasi pada kualitas, mengingat selama ini usaha pembaharuan dan peningkatan kualitas pendidikan Islam tidak secara komprehensif, dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara profesional.

Badrudin, Purwanto, Yedi, Siregar, dan Chairil (2017) menjelaskan bahwa di sektor peningkatan kualitas dan mutu pendidikan Islam, Pemerintah telah memberikan otoritas pada Kementerian Agama untuk mengatur penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren dan madrasah, baik itu dari segi pengembangan SDM, pembiayaan, peningkatan mutu dan sekaligus pengembangan kelembagaan. Perhatian Pemerintah terhadap pendidikan agama tidak perlu dipertanyakan kembali. Hal tersebut telah di tuangkan dalam UU No 20/2003 dan kemudian diperkuat dengan PP No 55/2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Pada PP tersebut, telah dijelaskan berkaitan dengan eksistensi pesantren, yaitu pada pasal 26 yang berarti sebagai berikut: (1) pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, berakhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan ketrampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan atau menjadi muslim yang

memiliki keterampilan untuk membangun kehidupan masyarakat yang Islami. (2) Pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan yang lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, menengah dan atau pendidikan tinggi (3) Peserta didik dan atau pendidik yang ada di pesantren yang diakui keahliannya di bidang ilmu agama tetapi tidak memiliki ijazah pendidikan formal dapat menjadi pendidik mata pelajaran/kuliah pendidikan agama di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang memerlukan, setelah menempuh uji kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Badrudin dkk, 2017)

Diakuinya pendidikan Islam sebagai bagian dari sub sistem pendidikan nasional menjadi peluang dan sekaligus menjadi tantangan. Dianggap sebagai peluang mengingat secara yuridis pendidikan Islam telah diakui keberadaannya oleh Pemerintah, sehingga eksistensi dari pendidikan Islam tergantung pada kualitas lulusan yang dihasilkan dan sejauh mana ekseibilitas lulusannya dapat diterima oleh masyarakat luas, serta dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan selanjutnya. Sementara dianggap sebagai tantangan mengingat sistem pendidikan nasional saat ini sedang dihadapkan pada problem tentang peningkatan standarisasi mutu dalam menghadapi perkembangan zaman, sehingga pendidikan Islam harus dapat merespon hal tersebut (Choiri & Fitriani, 2011).

Pada ayat (3) dalam Peraturan Pemerintah tersebut secara khusus memberikan pengakuan terhadap lulusan pesantren untuk menjadi pengajar materi ilmu agama sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan setelah melalui uji kompetensi yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengakuan tersebut tentu harus dibuktikan dengan surat keterangan tamat dari pesantren atau semacam ijazah. Oleh karena itu, Direktorat Jendral Kelembagaan Islam

mengeluarkan surat edaran tentang legalisasi ijazah pesantren. Salah satu isi dari surat edaran tersebut menyangkut tentang pelajaran yang harus ada di pesantren agar ijazah tersebut diakui. Surat edaran tersebut juga sekaligus menjadi petunjuk teknis tentang bagaimana cara pesantren memberikan ijazah atau sertifikat kepada santri yang lulus pada pendidikan pesantren. Ada beberapa pelajaran yang diajarkan oleh pesantren agar ijazahnya diakui yaitu pada tingkatan *ibtidaiyah* mata pelajaran yang harus diajarkan antara lain: al-Qur'an, tauhid, fiqh, nahwu, sharaf, akhlaq, serta pelajaran pendukung lainnya. Pada tingkat Tsanawiyah mata pelajaran yang diajarkan antara lain: al-Qur'an, fiqh, tauhid, akhlak, tarikh, nahwu, sharaf, tajwid, serta materi pendukung lainnya, Sementara pada tingkatan aliyah materi yang diajarkan meliputi: ilmu tafsir, tafsir, ilmu hadis, hadis, fiqh, ushul fiqh, nahwu, sharaf, tauhid, tarikh, balaghah, serta pelajaran lainnya yang mendukung (kemenag.go.id)

Data dari EMIS (2015) menyebutkan pada tahun 2014/2015 tercatat ada sebanyak 28.961 pondok pesantren dengan jumlah murid sebesar 4.028.660 di seluruh Indonesia. Keberadaan pesantren setidaknya telah mewakili sekitar 10% dari total jumlah sekolah di Indonesia pada tahun 2014/2015. Sementara data dari *world bank* (2019), sekitar 15% murid SD dan SMP mengenyam pendidikan di pesantren. Mayoritas dari mereka berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah dan tinggal di daerah pedesaan. Hal tersebut dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

| No. | Tipe Sekolah   | Negeri         | Swasta  |
|-----|--|----------------|---------|
| 1.  | Sekolah Dasar  | 132.609        | 14.904  |
| 2.  | Sekolah Menengah Pertama                                   | 22.209         | 14.309  |
| 3.  | Sekolah Menengah Atas (termasuk Sekolah Menengah Kejuruan) | 9.482          | 15.452  |
| 4.  | Madrasah Ibtidaiyah (MI)                                   | 1.686          | 22.667  |
| 5.  | Madrasah Tsanawiyah (MTs)                                  | 1.437          | 15.304  |
| 6.  | Madrasah Aliyah (MA)                                       | 759            | 6.823   |
| 7.  | Pesantren  | -              | 28.961  |
|     | <b>Total</b>   | 168.182        | 118.420 |
|     |  | <b>286.602</b> |         |

Tabel 1.1 Jumlah Lembaga pendidikan di Indonesia

Sumber: EMIS. 2015. Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan

Menurut Dhofier, (2009) Sejak tahun 2005, Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren telah memberikan 500 beasiswa setiap tahunnya pada santri yang berprestasi untuk ikut program sarjana di kampus unggulan. Program tersebut merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Agama dengan kampus unggulan seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institute Teknologi Surabaya, Institute Teknologi Bandung, Institute Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, dan Universitas Islam Syarif Hidayatullah.

Dhofier (2009) melanjutkan tidak hanya sampai disitu pesantren juga terbukti telah mampu mendirikan perguruan tinggi. Tercatat pada 2001 Pesantren Al-Asy'ariyyah, Wonosobo, Jawa Tengah telah berhasil mendirikan Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ). Pada perkembangannya tahun 2008 Universitas Sains Al-Qur'an membuka program Pascasarjana bidang studi Ilmu al-Qur'an dan studi pendidikan Islam. Selanjutnya pada tahun 2009 mahasiswa Universitas Sains Al-Qur'an telah mencapai 5.000 mahasiswa dan tersebar kedalam beberapa fakultas,

antara lain Fakultas Ilmu Teknik dan Komputer, Fakultas Bahasa dan Sastra, Fakultas Ekonomi, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Akademi Kebidanan dan Program Pascasarjana.

Perkembangan pesantren saat ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Pendidikan pesantren telah mengalami perubahan secara variatif baik itu dari segi manajemen, susunan organisasi dan kurikulum. Sepertihalnya dengan penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan pesantren mulai mengalami perubahan pada wilayah manajemen, susunan organisasi dan manajemen keuangan. Perubahan tersebut dapat dinilai dari perubahan gaya kepemimpinan yang otoriter paternalistik ke dipolmatik partisipatif dan kharismatik ke rasionalistis (Masyhud & Khusnordilo. 2003).

Sayangnya perubahan yang terjadi di dalam pendidikan tersebut tidak dilakukan oleh semua pesantren. Secara umum banyak pesantren yang mengalami kendala yang cukup serius berkaitan dengan ketersediaan SDM profesional yang masih minim dan manajemen organisasi yang umumnya masih bersifat tradisional. Misalnya belum adanya pemisahan antara yayasan, pimpinan madrasah, guru dan staf administrasi. Selain itu masih banyak persoalan lainnya seperti belum adanya transparansi berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pembagian peran dalam pendidikan yang belum terdistribusi dengan baik, pengembangan akademik yang kurang baik, bobot kinerja yang tidak berdasarkan aturan baku (Mochtar, 1999).

Arifin (1991) memberikan analisis terhadap kelemahan pendidikan Islam. Menurutnya, pendidikan Islam memiliki kelemahan terkait dengan rendahnya penguasaan terhadap sistem dan metode belajar, ketajaman dalam menafsirkan era,



manajemen organisasi, penguasaan teknologi. Hal tersebut secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap rendahnya animo masyarakat.

Sementara Suryadi dan Tilaar (1993) menyebutkan terjadi pergeseran paradigma di dalam masyarakat mengenai pendidikan. Masyarakat saat ini menilai bahwa pendidikan sebagai sebuah investasi, agar anaknya memiliki ketrampilan dan pengetahuan, dan sekaligus memiliki kemampuan untuk bersaing di masa depan. Ukuran kesuksesan seseorang dapat di lihat dari jenis pekerjaan dan tingkat penghasilan yang didupatkannya. Oleh karena itu tidak heran jika masyarakat mulai selektif dalam memilihkan lembaga pendidikan bagi anaknya mulai dari jenjang pendidikan terendah sampai pendidikan tinggi.

Di tengah tuntutan dari masyarakat yang semakin kuat, dunia pendidikan masuk dalam era teknologi global yang mendorong sinergi berbagai informasi yang dijadikan sebagai proposisi dan sekaligus kerangka berfikir dalam memecahkan masalah. Karakteristik era teknologi menuntut adanya pergeseran pola pikir, tingkat kompetisi, upaya pemenuhan kebutuhan dan sekaligus budaya untuk *survive*. Selain itu era teknologi mengharuskan berbagai sendi kehidupan berbasis pada pengetahuan baik itu bidang pendidikan (*education*), ekonomi dan industri (*economic and industry*), dan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (*social empowering*) (Mukhadis 2013).

Melihat fakta demikian, ada langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi abad 21 ini. Langkah tersebut bertujuan agar bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, salah satunya melalui bidang pendidikan. Pembangunan karakter dalam dunia pendidikan sangat diperlukan melalui pengintegrasian antara kecakapan pengetahuan, kemampuan literasi digital dan penguasaan terhadap teknologi (Kemendikbud, 2017).

Abad 21 menuntut seseorang untuk memiliki ketrampilan baik itu *hard skill* ataupun *soft skill* agar dapat terjun dalam dunia pekerjaan dan mampu bersaing dengan negara lain. “*the core subjects and interdisciplinary 21<sup>st</sup> century themes are surrounded by three sets of skills most in demand in the 21<sup>st</sup> century: (a) learning and innovation skills, (b) information, media and technology skills, (c) life and career skills*” (Trilling & Fadel, 2009).

Di tengah perkembangan dunia sangat cepat, pendidikan Islam dituntut untuk mampu merespon perkembangan zaman. Konsep dari pendidikan agama diarahkan untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Pendidikan agama akan membimbing dan mengarahkan manusia untuk menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Meskipun demikian bukanlah sesuatu yang mudah, akan tetapi perlu dilakukan sehingga pendidikan agama menjadi pembimbing yang mengarahkan manusia untuk mendapatkan kesejahteraan dan menjadi makhluk terdidik yang bertaqwa (Arifin, 2003).

Perintah untuk menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi telah diatur dalam firman Allah surat Al Qasas ayat 77 sebagai berikut:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ  
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي  
 الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.

*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”*  
(Depag RI, 1989).

Selanjutnya dalam pendidikan Islam, orang tua juga memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak sejak dini. Seperti yang tercantum dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ  
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Pada surat An-Nisa: 9 tersebut menerangkan bahwa orang tua memiliki peranan yang signifikan dalam mendidik anaknya. Tanggung jawab tersebut antara lain:

*Pertama* orang tua harus merasa khawatir jika anaknya dalam keadaan lemah, sehingga sebagai orang tua harus berusaha untuk mewujudkan generasi berkualitas yang memperhatikan pendidikan jasmani dan rohani. Allah mengharuskan setiap umat manusia untuk tidak menghasilkan keturunan yang lemah dan tidak memiliki daya saing.

*Kedua* orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik anaknya sejak dini dan membekalinya dengan aqidah. Ada dua hal pokok yang perlu ditekankan kepada anak kaitannya dengan aqidah. Pertama tentang *Tauhid Rububiyah*, dimana orang tua mengenalkan anaknya bahwa Allah adalah penguasa semesta alam dan tempat untuk bersandar, Kedua tentang *Tauhid Uluhiyah*, dimana orang tua meyakinkan kepada anaknya bahwa Allah merupakan satu-satunya dzat yang wajib untuk disembah.

*Ketiga*, orang tua mempunyai tanggung jawab mendidik anak sejak dini dengan *akhlakul karimah* (akhlak yang baik). Pendidikan akhlak mulai sejak kecil

sangat penting untuk dilakukan, karena anak usia dini adalah fase dimana seorang anak akan meniru setiap perkataan dan perbuatan yang di lihat dan didengarkan. Pentingnya seorang anak untuk mempunyai akhlak yang baik ini telah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi “*Innama bu’itstu liutammima makarimal akhlaq*” (sesungguhnya aku diutus ke dunia ini tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak) (Djamarah, 2004).

Dunia sedang memasuki era disrupsi, dimana secara tidak langsung telah membawa perubahan yang mendasar pada segala bidang dalam kehidupan. Perubahan muncul dengan kecepatan yang signifikan. Organisasi kecil yang berjalan lebih cepat dan terdistribusi menggeser peran dari *incumbent* mapan dalam segala bidang. Sementara *incumbent* cenderung bertahan dalam situasi disrupsi dengan memanfaatkan kepemimpinan yang visioner dengan mengkanibalisasi aset dan menghasilkan inovasi yang radikal (Gerald, 2006).

Disrupsi dalam bidang pendidikan dimaknai sebagai kemunculan fenomena baru yaitu cara-cara baru yang menggeser cara-cara lama yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan zaman. Cara-cara baru tersebut dimaknai sebagai teknologi, pendekatan, media pembelajaran, proses pembelajaran, sudut pandang, ruang kelas dan lain-lain. Inovasi disruptif telah merubah model pembelajaran yang konvensional yang memiliki orientasi pada penyampaian informasi atau transfer ilmu pengetahuan kearah pengembangan individu. Era disruptif muncul dengan membawa sesuatu hal yang berbeda, lebih sederhana, terjangkau, dan mudah diakses. Keberadaan dan manfaat dari kecanggihan teknologi tersebut akan menjadikan seseorang akan lebih banyak menggunakannya (Horvath, 2017).

Menurut Kasali (2018) saat ini pendidikan telah menjadi sasaran dari disrupsi yang didorong perkembangan inovasi terutama inovasi teknologi digital.

Pada masa yang akan datang mulai bermunculan institusi pendidikan yang mendisrupsi diri, beradaptasi dan memimpin perubahan secara fundamental. Gelombang disruptif yang muncul meliputi: *on demand* jasa pendidikan dan ketrampilan, *open source* jasa pendidikan dan ketrampilan, kurikulum yang lebih bersifat personal dan *taylor mode*, aplikasi pendidikan yang responsif, layanan konten tanpa batas dan *platform* pendidikan yang bersifat kolaboratif.

Lebih lanjut Kasali (2018) menjelaskan jika keberadaan pendidikan bertujuan untuk peningkatan kualitas pendidikan (*education quality*), pemerataan pendidikan (*education for all*), dan dapat diakses karena harganya relatif terjangkau (*low budget*) maka proses disrupsi dengan memanfaatkan inovasi teknologi akan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam kurun waktu 10 tahun kedepan, Kasali memprediksi pendidikan akan mengalami tekanan yang sangat besar mulai dari perubahan cara mengajar, standar kualitas, dan perkembangan teknologi. Algoritma dan kecerdasan artifisial akan memiliki pengaruh yang besar terhadap proses pembelajaran. Selain itu pendekatan pembelajaran yang masih konvensional dengan menekankan *what to learn* akan bergeser dengan menggunakan pendekatan *how to learn* (Kasali, 2018).

Hasil penelitian dari Departemen Pendidikan AS yang berusaha membandingkan antara pendidikan online dan tatap muka menemukan bahwa siswa memiliki prestasi lebih baik dalam kursus online daripada dalam kursus tatap muka. Sementara kursus yang memadukan pengajaran online dan tatap muka menghasilkan keuntungan yang cukup besar karena: a) siswa dapat menghabiskan lebih banyak waktunya untuk mengerjakan tugas; b) siswa diberi kesempatan secara mandiri untuk lebih mengontrol pembelajaran yang mereka lakukan; dan; c)

siswa diberi lebih banyak waktu untuk melakukan refleksi tentang proses pembelajaran yang selama ini dilakukan (Garrison & Kanuka, 2004).

Bagaimana kualitas pembelajaran online di era disruptif? Christensen, Horn, dan Johnson (2008), baru-baru ini menerapkan teori pembelajaran secara online tersebut pada pendidikan K-12. Mereka menarik sebuah kesimpulan bahwa penyisipan komputer di ruang kelas K-12 merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin untuk dilakukan, karena akan merubah model pembelajaran yang umum dilakukan. Akan tetapi penyediaan fasilitas komputer sebagai upaya menjadikan siswa sebagai pusat pendidikan menjadi sangat memungkinkan. Bagi siswa yang di sekolahnya tidak menawarkan mata pelajaran ataupun ketrampilan tertentu, opsi pembelajaran online memungkinkan mereka untuk menjadi pilihan alternatif sesuai dengan bakat dan minat mereka. Para peneliti mendokumentasikan kenaikan dalam pendaftaran di program *Apex Advanced Placement (AP)*, dengan total lebih dari satu juta pendaftaran siswa di lebih dari 4.000 distrik sekolah. Sekolah menengah virtual, laboratorium kimia virtual, dan inovasi lainnya berkontribusi pada pertumbuhan pendidikan K-12 online. Hal tersebut akan terus mengalami peningkatan disebabkan oleh empat faktor yaitu: 1) peningkatan kapasitas secara berkelanjutan; 2) mempermudah bagi siswa, dosen, dan orang tua untuk memilih jalur pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik; 3) mengatasi dampak dari kekurangan guru; 4) meminimalisir penggunaan biaya pendidikan (Christensen, et al. 2008).

Conole, de Laat, Dillon dan Darby (2008) menyatakan bahwa proses pembelajaran yang telah disesuaikan dengan kemajuan zaman merupakan hasil dari perkembangan teknologi digital dan alat-alat canggih yang memungkinkan siswa untuk menghasilkan konten mereka sendiri dan mencari bantuan bila diperlukan,

dari perangkat lunak hasil dari bimbingan belajar. Artinya siswa diberikan ruang untuk berkreasi dalam rangka untuk mengembangkan kemampuan mereka sesuai dengan keinginan mereka (Conole, et al. 2008).

Oleh karena itu kepemimpinan di era disrupsi berusaha untuk menyelaraskan antara nilai dan tujuan, menginspirasi orang lain, menyesuaikan diri dengan persoalan, dan memajukan kesejahteraan, serta menerapkan strategi yang komprehensif dan rendah hati (Abella-Zata, 2018). Sementara itu Clerkin dalam Jakubik, Maria, Berazhny dan Ivan (2017) berusaha melakukan identifikasi terhadap beberapa praktik kepemimpinan yang tidak dapat digantikan oleh sistem komputasi digital antara lain: persepsi dan manipulasi, kecerdasan kreatif (berupa kemampuan artistik dan orisinalitas), fleksibilitas ketangkasan dan keseimbangan, dan kecerdasan sosial (negosiasi, persuasi dan pengasuhan). Jakubik juga merumuskan beberapa ketrampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di era digital antara lain: a) berfikir inklusif, b) memiliki kecerdasan sosial, c) komunikasi dengan jaringan berjalan dengan baik, d) kerja tim untuk kreasi dan kolaborasi, e) memiliki kemampuan untuk mendelegasikan kewenangan dalam rangka pemberdayaan anggota, f) mengantisipasi perubahan yang akan terjadi di masa depan dengan membuat visi dan tujuan (Jakubik, et al. 2017).

Sudah menjadi rahasia umum jika keberadaan pesantren sangat dekat dengan sosok kiai yang sangat otoritatif sekaligus merupakan pusat seluruh kebijakan yang ada di dalam pesantren. *Pertama*, kepemimpinan bersifat sentralistik terhadap individu yang disandarkan pada hubungan yang bersifat paternalistik. Hal tersebut menyebabkan terjadinya monopoli sehingga tidak ada pendelegasian kewenangan dalam proses berjalannya organisasi. *Kedua*, pesantren dimiliki oleh individu atau biasanya dikuasai oleh keluarga. Kiai sebagai pemilik

dan sekaligus pengasuh memiliki pengaruh yang besar dan tidak dapat diganggu gugat. Faktor *nasab* (keturunan) juga sangat kuat sehingga seorang kiai dapat mewariskan kepemimpinan pesantren kepada anaknya atau salah satu dari anggota keluarga yang dikehendakinya (Turmudi, 2004).

Keberadaan kiai di lingkungan pesantren menjadi tokoh sentral yang disegani oleh masyarakat. Barokah dan kwalat menjadi sesuatu hal lazim yang diyakini masyarakat, sehingga masyarakat memiliki ketaatan dan rasa hormat terhadap kepemimpinan kiai. Ketokohan yang dimiliki oleh seorang kiai, dengan kedalaman pengetahuan agama yang luas, keimanan, serta akhlak yang baik, semakin membuat santri dan masyarakat yakin bahwa seorang kiai memiliki kedekatan dengan Allah SWT dan bisa memberikan barokah serta kwalat kepada siapa saja yang tidak sesuai dengan perintah agama. Sebagai pemimpin agama, seorang kiai juga dinilai menjalankan sifat kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, yaitu: *shiddiq* (jujur), *amanah* (tanggung jawab), *tabligh* (menyampaikan sesuatu yang benar dan salah), *fathonah* (cerdas) (Hakim, 2008).

Keberadaan kiai yang sangat dekat dengan masyarakat kerap kali dianggap mampu memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Disini kepemimpinan kiai dalam mempertahankan eksistensinya sebagai rujukan masyarakat dalam memecahkan masalah mendapatkan ujian. Oleh karena itu kiai harus memiliki kedalaman ilmu agama sebagai modal dalam mengarahkan, membina dan mendidik masyarakat ditengah perkembangan zaman (Jamaluddin, 2012).

Selain itu, dalam rangka untuk menghadapi perkembangan teknologi informasi yang berjalan dengan sangat cepat, pesantren sebagai sebuah institusi pendidikan, sosial dan keagamaan diharapkan mampu beradaptasi dengan



membuat kebijakan yang strategis. Kebijakan tersebut berkaitan dengan pembaharuan yang adaptif menjawab kebutuhan masyarakat terutama pada wilayah pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, tanpa harus mengorbankan jati diri pesantren (Gazali, 2018).

Berkaitan dengan kepemimpinan kiai dalam pembaharuan pendidikan pesantren, peneliti menjadikan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah di Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sebagai objek penelitian. Dipilihnya Pondok Pesantren tersebut karena dalam mendidik para santri, telah mengkolaborasikan antara sistem pendidikan modern (*kholafiyyah*) dengan sistem pendidikan tradisional (*salafiyyah*). Output yang diharapkan yaitu keseimbangan antara pengetahuan umum dengan pengetahuan agama. Pada sistem pembelajaran di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Wonosobo lebih menitikberatkan pada tiga hal yang menjadi identitas dari pondok pesantren ini yaitu: hafalan Al *Qur'an* (*Tahfidzul Qur'an*), kajian kitab kuning, dan penguasaan bahasa asing dan teknologi informasi.

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah merupakan salah satu pondok pesantren yang berusaha untuk menyeimbangkan antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Hal tersebut dapat di lihat dari berdirinya sekolah-sekolah formal yang berada dibawah naungan Kementerian Agama mulai dari TK/Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Kalibebber, Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Kalibebber, dan Madrasah Aliyah Ma'arif Kalibebber pada tahun 1960.

Selanjutnya Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah juga mendirikan sekolah formal dibawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu SMP, SMA, SMK Takhasus Al-Qur'an dan Institut Ilmu Al-Qur'an yang sekarang telah berubah menjadi Universitas Sains Ilmu Al- Qur'an.

Ada hal unik dari kesekian lembaga pendidikan formal yang telah didirikan oleh pesantren. Masing-masing lembaga pendidikan formal tersebut memiliki kurikulum yang mewajibkan kepada peserta didik untuk menghafalkan Al Qur'an.

Perkembangan lembaga pendidikan formal di bawah naungan yayasan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah telah berusaha untuk beradaptasi dengan kemajuan zaman. Ada beberapa hal yang menjadi indikator terjadinya pembaharuan pendidikan pada sekolah di bawah pondok pesantren antara lain dengan kurikulum pembelajaran dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS). Berdasarkan penelusuran dari peneliti, masih sangat sedikit sekolah dibawah naungan pondok pesantren yang menggunakan sistem SKS. Selain itu di dalam kurikulum pembelajarannya juga memuat tentang kecakapan dalam penguasaan terhadap teknologi. Hal tersebut dapat di lihat dari materi yang diajarkan pada SMK Takhasus Al-Qur'an seperti Membuat website dinamis menggunakan *Adobe dreamweaver CS 3* dan *MySQL*, pemrograman web dinamis tingkat lanjut, konsep web dinamis sederhana untuk mengelola basis data, desain grafis dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti ingin berusaha untuk menggali lebih dalam lagi mengenai peran kiai dalam pembaharuan pendidikan pesantren di era disrupsi. Peran tersebut berkaitan dengan kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang kiai serta ide-ide dan gagasan kiai dalam membawa pendidikan pesantren beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

## B. Pembatasan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah di atas, peneliti akan membatasi penelitian ini seputar permasalahan kepemimpinan kiai dalam pembaharuan pesantren di era disrupsi. Penelitian ini menjadikan Kepemimpinan Kiai Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Wonosobo sebagai objek penelitian, dikarenakan pesantren ini memiliki keunikan yaitu mampu mempertahankan sistem pendidikan *salaf* dan mampu menciptakan sistem pendidikan yang beradaptasi dengan perkembangan zaman. sehingga peneliti ingin menggali data dan informasi seputar bagaimana kepemimpinan kiai dalam pembaharuan pendidikan pesantren di era disrupsi, ide-ide kiai dalam pembaharuan pendidikan pesantren, pengelolaan pesantren dan sekolah yang berada di bawah naungan yayasan. Hal tersebut dilakukan mengingat terbatasnya waktu dan biaya di miliki, sehingga peneliti akan fokus pada Kepemimpinan Kiai Dalam Pembaharuan Pendidikan Pesantren Di Era Disrupsi (Studi Kepemimpinan Kiai Di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Wonosobo).

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan fokus masalah yang telah disebutkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemimpinan kiai dalam pembaharuan pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Wonosobo dalam menghadapi era disrupsi pendidikan?
2. Bagaimana ide-ide kiai dalam mengembangkan pendidikan Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Asy'ariyyah Wonosobo dalam menghadapi era disrupsi?
3. Bagaimana peran kiai dalam mengelola pesantren dan sekolah dibawah naungan yayasan.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengeksplorasi bagaimana kepemimpinan kiai dalam pembaharuan pendidikan pesantren di era disrupsi
2. Untuk mengetahui apa saja yang dilakukan oleh kiai dalam rangka melakukan pembaharuan pendidikan pesantren
3. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan kiai dalam melakukan pembaharuan pendidikan pesantren di era disrupsi

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis penelitian ini adalah memberikan informasi tambahan sebagai data untuk pengembangan pada prodi Manajemen Pendidikan khususnya berkaitan dengan kepemimpinan kiai dalam pembaharuan pendidikan pesantren. Selain itu juga memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan pendidikan pesantren bagi mahasiswa Manajemen Pendidikan.

Sementara itu, manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada pihak pondok pesantren dalam mengembangkan pendidikan pesantren agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan evaluasi dan sekaligus masukan bagi pesantren, sekolah, akademisi dan stakeholder terkait yang memiliki kepentingan dengan pembaharuan pendidikan pesantren.

#### **F. Kebaruan Penelitian (*State of the Art*)**

Penelitian yang mengkaji tentang kepemimpinan kiai pesantren dalam pembaharuan pendidikan telah banyak di ulas oleh peneliti-peneliti sebelumnya, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Moh. Baidlawi (2006) yang berjudul

“Modernisasi Pendidikan Islam (Telaah Atas Pembaharuan Pendidikan di Pesantren)”. Penelitian ini hanya fokus pada bagaimana pendidikan Islam mampu mencetak manusia Islami yang *tafaqquh fi al-din*, berakhlakul karimah dan memiliki keahlian sesuai dengan perkembangan zaman.

Kemudian tesis yang di tulis oleh Winarto (2015) yang berjudul Kepemimpinan Kiai Dalam Pembaruan Pondok Pesantren (Studi Multi Situs Di Pondok Pesantren Lirboyo Dan Pondok Pesantren Al Falah Kediri). Penelitian ini hanya mengupas tentang 1) Bagaimana Gaya Kepemimpinan pesantren tersebut, 2) Bagaimana Periodisasi Kepemimpinan Pesantren tersebut, 3) Bagaimana Pimpinan Pesantren Menjalin Keharmonisan dengan Unit-Unit, 4) Bagaimana Kebijakan Pimpinan Dalam Mengikat Unit dan Menyikapi Keberagaman Unit-Unit Pesantren.

Tentu hal tersebut di atas sangat berbeda dengan tema penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Kebaruan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah peneliti mengangkat tema Kepemimpinan Kiai Dalam Pembaharuan Pendidikan Pesantren Di Era Disrupsi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kiai dalam pembaharuan pendidikan pesantren di era teknologi informasi, ide-ide kiai dalam pembaharuan pendidikan pesantren, dan bagaimana pengelolaan pesantren dan sekolah formal di era perkembangan teknologi informasi.